

BAB V

PENUTUP

Hasil pembahasan mengenai implementasi kebijakan program Keluarga Berencana (KB) di Kota Jambi tahun 1980-2019 dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan Keluarga Berencana (KB) di Kota Jambi mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Dasar dari perkembangan program Keluarga Berencana tidak lepas dari instansi ataupun lembaga yang menjalankan tugas program Keluarga Berencana di Kota Jambi. Program Keluarga Berencana di Kota Jambi pada tahun 1980 sampai tahun 2003 masih dijalankan oleh BKKBN Provinsi Jambi. Akan tetapi pada tahun 2003 dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2003 tentang organisasi perangkat daerah, maka program Keluarga Berencana Kota Jambi diserahkan oleh pemerintah Kota Jambi dan dibentuklah suatu lembaga baru yang bernama BKBKS (Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera).

Pada tahun 2008 BKBKS Kota Jambi berganti nama menjadi BPPKB (Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana). Perubahan ini berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2008 mengenai pembentukan organisasi lembaga teknis daerah Kota Jambi dalam bidang gender, peningkatan kualitas hidup perempuan, kesejahteraan, perlindungan anak, Keluarga berencana dan Keluarga Mandiri. Pada tahun 2016 BPPKB berganti nama lagi menjadi DPPKB (Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana). Perubahan nama ini berdasarkan atas peraturan daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang

pembentukan dan susunan perangkat daerah kedudukan, susunan, organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja sehingga DPPKB fokus pada pengendalian penduduk dan keluarga berencana kota Jambi.

Implementasi kebijakan program Keluarga Berencana di kota jambi terlihat dari realisasi program Keluarga Berencana yang berlangsung dari tahun ke tahun. Realisasi ini mencakup jumlah Akseptor KB yang dilihat dari PUS (Pasangan Usia Subur), dan jumlah pemakaian alat kontrasepsi terhitung dari tahun 1980-2019. Upaya yang dilakukan pemerintah dari tahun 1980 tidak lepas dari pendekatan ke masyarakat Kota Jambi melalui KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) oleh Penerangan dan motivasi yang dilakukan oleh PLKB/PKB di Kota Jambi. Pada tahun 1987 di Kota Jambi mulai mengenal mengenai KB mandiri dimana masyarakat dapat membuat pilihan atas dasar kesadaran sendiri. Pada tahun 1990-an rangkaian pelayanan KIE dan pelayanan kontrasepsi lebih ditingkatkan melalui pendekatan konseling.

Pedekatan konseling ini masih berlanjut hingga saat ini. Pada setiap Kecamatan di Kota Jambi terdapat 2 petugas PLKB yang melayani program Keluarga Berencana di Kota Jambi. Pelayanan alat kontrasepsi yang tersedia meliputi metode Kontrasepsi Jangka Panjang dan metode Kontrasepsi Jangka Pendek. Mekanisme Pencatatan dan Pelaporan Hasil Pelayanan Kontrasepsi didapatkan dari laporan Faskes yang kemudian dilaporkan secara manual ke dinas yang terkait yaitu DPPKB kota Jambi. Fasilitas Kesehatan yang bekerja sama dan dengan DPPKB Kota Jambi ialah Rumah Sakit umum, ataupun rumah sakit swasta yang menjalin kerja sama dengan

DPPKB, kemudian Puskesmas, Puskesmas Pembantu (Pustu), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Praktik Bidan dan Praktik Dokter.

Pengaruh implementasi kebijakan program keluarga berencana di Kota Jambi pada kesehjateraan masyarakat Kota Jambi dapat dilihat dari upaya dinas terkait dalam mengadakan bantuan terutama kepada Keluarga Prasejahtra di Kota Jambi. Kegiatan ini dinamakan UPPKA (Usaha Peningkatan Pendapatan Kelompok Akseptor) yang terlaksana dari tahun 1980 an sampai 2019. Kegiatan ini berupa bantuan dana yang dikelola dalam bentuk koprasi yang dijalankan oleh akseptor KB di setiap kecamatan di Kota Jambi. Usaha yang dilakukan ialah usaha mandiri / perorangan dimana usaha ini terdiri dari usaha kerajinan, produk olahan makanan, dan usaha lain-lain.